

BAB VI

PENUTUP

VI.1 Kesimpulan

Analisis mengenai keputusan Amerika untuk bergabung kembali dengan Paris Agreement di era Pemerintahan Joe Biden mencerminkan arah orientasi kebijakan luar negeri Amerika. Pergeseran dalam kebijakan iklim global menunjukkan perubahan administratif yang membedakan Joe Biden dengan pemerintahan sebelumnya yaitu Donald Trump. Berbeda dengan kebijakan luar negeri Trump yang cenderung mengabaikan isu lingkungan, pemerintahan Joe Biden justru menempatkan isu lingkungan sebagai agenda utama. Keputusan untuk bergabung dengan Paris Agreement mencerminkan komitmen baru kepemimpinan Amerika dalam aksi iklim global yang melalui proses kompleksitas pertimbangan kognitif dan rasional.

Orientasi kebijakan luar negeri Amerika di era Joe Biden memperlihatkan pendekatan yang sangat menonjol dalam upaya mitigasi perubahan iklim, berbanding terbalik dengan pendekatan “America First” Donald Trump yang menekankan unilateralisme dan pandangan skeptis terhadap perubahan iklim. Joe Biden memperkenalkan pendekatan “America Is Back” yang menandakan kembalinya kontribusi aktif Amerika dalam diplomasi internasional. Perbedaan orientasi Joe Biden bukan hanya sebatas tindakan responsif terhadap kebijakan Donald Trump, tetapi mencerminkan nilai dan kerangka kognitif Joe Biden dan pemerintahannya dalam melihat aksi iklim. Keputusan untuk bergabung dengan Paris Agreement mengirimkan sinyal kuat kepada komunitas internasional bahwa Amerika siap untuk mengemban kembali tanggung jawab global dalam mengatasi masalah iklim, menyadari posisi Amerika sebagai salah satu negara penyumbang emisi terbesar.

Proses perumusan kebijakan iklim ini melibatkan pertimbangan kompleks yang melalui pertimbangan kognitif dan rasional. Pada tahap kognitif, biaya politik yang harus diterima oleh pemerintahan Joe Biden sangat besar pada opsi tetap keluar dari Paris Agreement. Biaya politik tersebut termasuk, risiko kehilangan basis koalisi pendukung, kredibilitas sebagai seorang pemimpin

dipertaruhkan akibat pengkhianatan janji kampanye, serta tindakan tidak responsif atas aspirasi rakyat. Keputusan untuk keluar akan mengkhianati basis koalisi pendukung Joe Biden yang sebagian besar mendukung dan mendesak upaya pemerintah dalam mitigasi perubahan iklim. Keputusan ini juga secara langsung mencerminkan ketidaksesuaian tindakan dengan janji kampanye yang selalu dideklarasikan Joe Biden bahwa Amerika akan berkomitmen kembali pada upaya-upaya mitigasi perubahan iklim. Ini secara tidak langsung akan mempengaruhi kredibilitas Joe Biden sebagai seorang pemimpin. Selain itu, keputusan ini akan membuat Joe Biden dipandang sebagai seorang pemimpin yang tidak mementingkan aspirasi rakyat, melihat bahwa mayoritas penduduk Amerika mendukung upaya pemerintah dalam mengatasi dampak perubahan iklim. Aspek-aspek tersebut secara kumulatif memberikan biaya politik yang besar bagi *political survival* Joe Biden.

Kemudian pada tahap rasional, terjadi pertimbangan untung rugi dalam memilih kebijakan yang optimal serta rancangan kebijakan yang strategis. Proses ini diawali dengan eliminasi opsi kebijakan “Tetap Keluar dari Paris Agreement” berdasarkan prinsip non-compensatory. Dengan demikian, maka prinsip tersebut meloloskan opsi kebijakan “Kembali Bergabung dengan Paris Agreement”. Tahap rasional akan menjelaskan secara mendalam arah kebijakan ini, termasuk mengkaji mekanisme, strategi, serta komitmen baru atau komitmen terdahulu yang mungkin ditinjau ulang. Secara politik, keputusan Biden untuk kembali bergabung ditujukan untuk mengembalikan kepemimpinan Amerika dan memperkuat legitimasi pemerintahannya sendiri di dalam negeri, berbeda dengan pada masa Obama yang berusaha untuk membangun momentum perjanjian iklim global. Akan tetapi, upaya yang telah dibangun oleh Obama terhambat akibat intervensi oleh Pemerintahan Donald Trump. Intervensi tersebut membuat public dunia mengecam tindakan Amerika dan membuat Amerika terisolasi dari ruang lingkup diplomasi iklim global. Strategi yang dilakukan oleh Joe Biden menghadapi hal ini adalah dengan menetapkan target NDCs yang lebih ambisius dibandingkan dengan era Obama, menekankan pendekatan “Whole of Government”, serta menunjuk John Kerry sebagai utusan khusus untuk memperlancar diplomasi.

Dari sisi ekonomi, keputusan bergabung akan mengamankan posisi Amerika dalam ekonomi global yang sedang mengalami transisi ke energi terbarukan. Joe Biden merancang upaya iklim dengan menetapkan undang-undang *Inflation Reduction Act (IRA)* dan *Bipartisan Infrastructure Law (BIL)* untuk memenuhi pengurangan emisi. Rancangan Undang-Undang ini menjawab kekhawatiran terhadap beban keuangan yang harus ditanggung swasta dan konsumen serta kekhawatiran atas ketersediaan lapangan kerja. Undang-Undang tersebut mampu menginvestasikan kepada swasta lebih dari \$100 miliar dan menyediakan sebanyak 100.000 lapangan kerja dalam manufaktur energi bersih.

Terakhir, dalam sektor lingkungan, bergabung kembali dengan Paris Agreement tidak hanya sekedar kembali ke titik awal setelah keputusan kontroversial Trump, tetapi juga merupakan rencana strategis untuk memperkuat komitmen lingkungan Amerika. Peningkatan target NDC, pendekatan “Whole of Government”, serta alokasi sumber daya dan investasi merupakan langkah strategis Joe Biden untuk meminimalisasi kerugian dan risiko fisik akibat bencana iklim. Dengan begitu, kontribusi Amerika dalam mitigasi krisis iklim global menjadi lebih efektif sehingga akan lebih mampu untuk melindungi sumber daya dan keberagaman satwa, serta kesejahteraan warga negara Amerika sendiri. Secara rasional, meskipun membutuhkan investasi yang besar di awal bagi upaya mitigasi, tetapi biaya ini jauh lebih kecil daripada potensi kerugian lingkungan yang harus ditanggung

Secara keseluruhan, analisis kalkulasi rasional menegaskan bahwa keputusan Joe Biden untuk kembali ke Paris Agreement merupakan pilihan yang strategis dan sudah melibatkan pertimbangan yang kompleks. Meskipun opsi ini masih menemui tantangan dalam implementasinya, tetapi Pemerintahan Joe Biden telah merumuskan strategi agar adaptif terhadap tantangan tersebut. Proses ini menunjukkan rasionalitas dalam kebijakan luar negeri, tidak hanya memilih opsi kebijakan terbaik, melainkan juga visi dan strategi yang disiapkan untuk mengatasi tantangan dari opsi kebijakan yang dipilih. Kalkulasi ini menekankan komitmen Amerika di era Joe Biden untuk memimpin aksi iklim sebagai entitas yang bertanggung jawab mengatasi tantangan eksistensial bersama, yang pada

akhirnya juga mengamankan kepentingan nasional Amerika dalam jangka panjang.

Pada akhirnya, analisis kebijakan luar negeri Amerika menggunakan teori poliheuristik menunjukkan bahwa keputusan untuk kembali bergabung dengan Paris Agreement merupakan upaya Joe Biden untuk mempertahankan kekuasaan politiknya. Di sisi lain, keputusan itu diambil juga didasarkan atas pertimbangan keuntungan yang didapatkan oleh Amerika dan kemampuan untuk mengatasi tantangan yang muncul dalam mengimplementasikan kebijakan.

VI.2 Saran

Berdasarkan analisis dalam tulisan ini, terdapat beberapa saran atau rekomendasi yang dapat memperkaya studi tentang kebijakan luar negeri Amerika Serikat ke depannya.

a. Saran Praktis

Penelitian ini menunjukkan bahwa konsistensi kebijakan merupakan pilar dalam diplomasi iklim. Perubahan kebijakan iklim luar negeri Amerika telah mengikis kepercayaan sekutu dan mitra. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintahan Amerika, terlepas dari pergantian administrasi, mampu memprioritaskan konsistensi dalam komitmen iklim internasional. Ini tidak hanya akan memperkuat kredibilitas diplomatik Amerika, tetapi juga mendorong negara lain untuk meningkatkan ambisi mereka.

b. Saran Akademis

- Penulis merekomendasikan untuk kembali membahas kebijakan luar negeri Amerika Serikat di masa Donald Trump. Lebih khusus adalah mengenai studi komparasi terhadap kebijakan luar negeri Amerika di era Donald Trump pada tahun 2017 dan tahun 2025. Perbandingan ini menarik karena terdapat aktor yang sama dalam hal ini Donald Trump yang juga melakukan hal yang sama. Ini mencerminkan konsistensi Donald Trump sebagai seorang pemimpin.
- Penulis merekomendasikan analisis perumusan kebijakan luar negeri yang mempertimbangkan kebijakan berlandaskan aspek kognitif dan kalkulasi rasional. Ini dilakukan agar kerangka kerja yang ditawarkan

mencerminkan kognitif seorang pemimpin sekaligus memaksimalkan utilitas dan mitigasi risiko. Dengan menganalisis kedua dimensi, dapat dicapai perumusan dan implementasi kebijakan luar negeri yang adaptif dan berkelanjutan.